

KEBIJAKAN KETAHANAN NASIONAL TERHADAP PELEMBAGAAN TRADISI MULTIKUTURALISME DALAM MENATA HUBUNGAN HARMONIS ANTAR ETNIS DI KABUPATEN BOALEMO PROVINSI GORONTALO

Roni Lukum^{1*}, Rauf Hatu², Sastro Wantu³, Ismet Sulila⁴, Yanti Aneta⁵

^{1,2,3,4,5.} Universitas Negeri Gorontalo

*Email: ronilukum23@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan ketahanan nasional terhadap pelebagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, mengungkap faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan ketahanan nasional terhadap pelebagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, untuk melihat implikasi kebijakan ketahanan nasional terhadap pelebagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Pengungkapan tujuan penelitian ini digunakan dengan metode penelitian kualitatif. Hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa (1). Kebijakan ketahanan nasional dalam melembagakan tradisi multikulturalisme pada penataan keragaman etnik di Kabupaten lewat Forum komunikasi antar umat beragama (FKUB) sebagai pelaksanaan kebijakan makro pemerintah pusat masih dalam kondisi sangat tangguh dalam mewujudkan integrasi nasional, (2) faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan ketahanan nasional terhadap pelebagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis disebabkan oleh kearifan lokal dan peran intitusi pendidikan formal (3). Dampak kebijakan ketahanan nasional terhadap pelebagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo telah memberikan kontribusi pada stabilitas keamanan, stabilitas ekoomi, stabilitas politik dan stabilitas sosial sehingga telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah kabupaten Boalemo sebagai akibat dari kontribusi warga transmigrasi pada berbagai sektor usaha pertanian, peternakan, kerajinan, sektor usaha perdagangan dari warga etnis yang berasal dari transmigrasi.

Kata Kunci: Kebijakan Ketahanan Nasional, multikulturalisme dan keharmonisan.

THE EFFECT OF DOWNWARD COMMUNICATION SATISFACTION LEVEL ON THE PERFORMANCE OF MBKM TEAM OF MQ FM RADIO JOGJA

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the national resilience policy towards the institutionalisation of multiculturalism traditions in managing harmonious relations between ethnicities in Boalemo Regency, Gorontalo Province, to reveal the factors that support the success of national resilience policy towards the institutionalisation of multiculturalism traditions in managing harmonious relations between ethnicities in Boalemo Regency, Gorontalo Province, to see the implications of national resilience policy towards the institutionalisation of multiculturalism traditions in managing harmonious relations between ethnicities in Boalemo Regency, Gorontalo Province. Disclosing the purpose of this research used a qualitative research method. The results of the research findings can be concluded that (1). The national resilience policy in institutionalising the tradition of multiculturalism in structuring ethnic diversity in the Regency through the Inter-religious communication forum (FKUB) as the implementation of the central government's macro policy is still in a very strong condition in realising national integration, (2). The factors that support the success of the national resilience policy towards institutionalising the tradition of multiculturalism in structuring harmonious relations between ethnicities are caused by local wisdom and the role of formal education institutions (3). The impact of national resilience policies on the institutionalisation of multiculturalism traditions in organising harmonious inter-ethnic relations in Boalemo Regency, Gorontalo Province has contributed to security stability, economic stability, political stability and social stability so that it has increased the economic growth of the Boalemo regency government as a result of the contribution of transmigration residents in various agricultural business sectors, livestock, crafts, trade business sectors from ethnic residents who came from transmigration.

Keywords: National Resilience Policy, multiculturalism and harmony.

Korespondensi: Roni Lukum S.Pd.,M.Sc. Universitas Negeri Gorontalo. Jl. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211. No. Hp: +62 821-9569-8660, *Email:* ronilukum23@gmail.com

PENDAHULUAN

Kehadiran warga transmigrasi di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo sejak tahun 1980an diawal hadir dilokasi hanya memiliki asset rumah dan lahan diberikan pemerintah daerah hanya 2 Ha dengan rumah tinggal ukuran atau tipe bangunan 36 fisik bangunannya terbuat dari papan dindingnya beratapkan seng dan lantainya hanya mesel biasa. Setelah waktu berjalan warga transmigrasi telah mengalami perubahan sosial sebagai wujud dari kerja keras warga transmigrasi sehingga kualitas hidupnya sudah sangat sejahtera. Dan hingga saat ini lokasi transmigrasi di Kabupaten Boalemo di kecamatan Paguyaman dan kecamatan Wonosari yang menguasai lahan pertanian adalah etnis transmigrasi. Begitu juga dengan usaha perdagangan warga etnis yang telah menguasai perdagangan di dua kecamatan dimana kecamatan Paguyaman dan kecamatan Wonosari. Namun kehidupan antara warga etnis dari kelompok transmigrasi dan warga kelompok etnis lokal Gorontalo masih dapat hidup damai tanpa terganggu dengan terjadinya perubahan sosial pada warga transmigrasi. Dengan demikian pemerintah daerah merasa diuntungkan dengan hadirnya warga transmigrasi, karena kontribusi terbesar dari warga transmigrasi wilayah Kabupaten Boalemo menjadi daerah lumbung pangan dari pemerintah Provinsi Gorontalo, demikian halnya dengan PAD (pendapatan asli daerah) mengalami peningkatan. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk sesegera mungkin membuat kebijakan ketahanan nasional melalui kebijakan mikro mengawal terwujudnya integrasi nasional yang permanen bagi warga transmigrasi dengan menetapkan PERDA tentang tradisi multikulturalisme, karena di Provinsi Gorontalo belum ada PERDA tentang tradisi multikulturalisme, karena urusan konflik sosial diserahkan kepada urusan pemerintah pusat.

Pendapat lain tentang multikulturalisme Charles Taylor menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya dalam masyarakat modern yang multikultural. Argumentasinya bahwa setiap individu atau kelompok budaya memiliki hak untuk diakui secara setara oleh negara dan masyarakat, dan pengakuan ini penting untuk martabat individu serta identitas kolektif. Berikut ini beberapa poin utama pandangan Taylor tentang pelebagaan tradisi multikulturalisme :

1. Pentingnya pengakuan, Taylor berpendapat bahwa masyarakat multikultural harus memberikan pengakuan terhadap berbagai identitas budaya. Pengakuan ini tidak hanya soal toleransi, tetapi memberikan tempat yang layak bagi identitas-identitas tersebut dalam ranah publik. menurutnya pengabaian atau penolakan terhadap pengakuan budaya bisa menyebabkan marginalisasi dan rasa rendah hati di kalangan kelompok minoritas.
2. Kesetaraan dalam pengakuan. Taylor menekankan bahwa multikulturalisme harus berdasar pada kesetaraan dalam pengakuan identitas. Tidak boleh ada kelompok budaya yang merasa inferior

atau tidak dihargai dalam struktur sosial dan politik. Kesetaraan ini menjadi dasar bagi terciptanya keadilan sosial.

3. Hubungan antara identitas dan martabat. Bagi Taylor, pengakuan budaya tidak hanya penting dari persepektif sosial, tetapi juga menyangkut martabat manusia. Jika identitas budaya seseorang tidak diakui, martabat mereka pun terancam.
4. Peran negara. Taylor berpendapat bahwa negara memiliki peran penting dalam mendukung dan memfasilitasi pengakuan budaya ini. Dalam pelebagaan tradisi multikulturalisme negara harus membuat kebijakan yang menghargai dan mengakomodasi berbagai tradisi dan budaya tanpa harus menciptakan hirarki antar budaya.
5. Dialog antar budaya. Taylor menyarankan bahwa masyarakat multicultural seharusnya didasarkan pada dialog terbuka antar budaya. Dialog ini memungkinkan pertukaran gagasan yang setara, dimana semua pihak dapat belajar dari satu sama lain.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui kebijakan ketahanan nasional terhadap pelebagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, (2). mengungkap faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan ketahanan nasional terhadap pelebagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, (3). untuk melihat implikasi kebijakan ketahanan nasional terhadap pelebagaan tradisi multikulturalisme dalam menata hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Argumen /hipotesis Argumen/hipotesis (sebab-akibat): X \square Y

Kebijakan ketahanan nasional melalui program pelebagaan tradisi multikulturalisme pada lokasi transmigrasi di kabupaten Boalemo menunjukkan hasil yang sangat positif, dimana dengan adanya sosialisasi yang intens atas kebijakan makro oleh Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB) membuat kabupaten Boalemo sebagai lokasi tujuan penempatan transmigrasi sejak tahun 1980 hingga saat ini tidak pernah mengalami konflik sosial antara warga transmigrasi dengan warga etnis lokal Gorontalo. Hal ini dibuktikan hasil wawancara dengan salah satu informan kunci yang terlibat dalam melebagan penataan tradisi multikulturalisme memberikan fakta sosial bahwa Implementasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam melebagan tradisi multikulturalisme melalui Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB) memberikan dampak positif pada kondisi hubungan antar etnis lokal Gorontalo dengan kelompok etnis trasmigrasi yang kondisinya masih sangat tangguh.

Literatur Review

Kebijakan ketahanan Nasional

Kebijakan ketahanan nasional yang bertujuan untuk membangun keharmonisan antar etnis biasanya menekankan pada menjaga stabilitas, persatuan, dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat. dalam konteks ini ketahanan nasional bukan hanya berkaitan dengan pertahanan militer, tetapi juga tentang

ketahanan sosial, budaya, dan politik. Berikut ini beberapa aspek penting yang dapat memahami kebijakan ketahanan nasional dalam membangun keharmonisan antar etnis :

- a Pengakuan identitas nasional. Salah satu tujuan utama kebijakan ketahanan nasional dalam konteks keharmonisan antar etnis adalah memperkuat identitas nasional yang mencakup semua kelompok etnis. Negara berusaha menciptakan rasa persatuan tanpa menghilangkan identitas etnis atau budaya . ini dapat dilakukan melalui pendidikan, program kesadaran nasional, serta simbol-simbol negara yang mencerminkan keberagaman , seperti bahasa, bendera, dan nilai-nilai kebangsaan.
- b Pelembagaan prinsip multikulturalisme. Dalam kebijakan ketahanan nasional, multikulturalisme sering kali diadopsi sebagai kerangka untuk mengakui dan menghargai keragaman etnis. negara dapat mendukung program-program yang mempromosikan penghargaan terhadap berbagai budaya, agama dan tradisi etnis yang ada di dalam masyarakat. ini dilakukan dengan mengakui hak-hak kelompok minoritas untuk mempraktekan budaya mereka sendiri, selama tetap dalam kerangka hukum dan konstitusi negara.
- c Pencegahan konflik antar etnis. Salah satu komponen penting dari kebijakan ketahanan nasional adalah pencegahan konflik antar etnis. konflik etnis dapat mengancam stabilitas dan integrasi nasional. Kebijakan negara harus mencakup upaya untuk mendeteksi konflik, menangani ketegangan yang muncul, dan menciptakan mekanisme resolusi konflik yang damai. Ini dapat dilakukan melalui dialog antar komunitas, melibatkan pemimpin adat dan agama, serta mediasi dari pemerintah.
- d Pembangunan sosial ekonomi yang inklusif. Ketidak setaraan ekonomi sering menjadi sumber ketegangan antar etnis. kebijakan ketahanan nasional harus memastikan pembangunan yang inklusif , dimana setiap kelompok etnis memiliki kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dan pekerjaan, dengan membangun infrastruktur yang merata dan program sosial yang adil, negara dapat meminimalkan kecemburuan sosia antar kelompok.
- e Pendidikan untuk toleransi dan keberagaman. Pendidikan multikultural merupakan elemen penting dalam kebijakan ketahanan nasional untuk membangun kehaemonisan antar etnis. Sistem pendidikan perlu dirancang untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghormatidan kesetaraan sejak dini. Kurikulum sekolah dapat mengajarkan tentang sejarah, budaya, dan konstitusi berbagai kelompok etnis dalam membangun negara.
- f Penguatan kelembagaan dan hukum. Negara memerlukan lembaga-lembaga yang kuat untuk mendukung harmoni antar etnis. ini termasuk lembaga hukum yang adil dan tidak diskriminatif, lembaga hak asasi manusia, serta mekanisme perlindungan minoritas. Undang-undang yang melindungi hak-hak kelompok minoritas dan mencegah diskriminasi etnis atau agama harus

diterapkan dengan tegas. Sanksi terhadap pelanggaran hak-hak ini juga harus jelas dan dijalankan secara konsisten.

- g Peran media dalam membangun Narasi harmoni. Media memiliki peran penting dalam membangun atau mengganggu keharmonisan antar etnis. Kebijakan ketahanan nasional harus melibatkan media dalam mengpromosikan narasi persatuan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Pemerintah dapat bekerja sama dengan media untuk menyebarkan pesan yang menguatkan kohesi sosial dan memperhatikan keberagaman etnis sebagai asset nasional, bukan ancaman.
- h Penggunaan diplomasi budaya. Negara dapat mengadopsi diplomasi budaya sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional, dimana budaya etnis yang berbeda dihargai dan dipromosikan baik dalam negeri maupun ditingkat internasional. Kegiatan budaya yang menampilkan keragaman etnis dapat memperkuat persatuan di dalam negeri dan juga memperbaiki citra negara di mata dunia.

Pelebagaan Tradisi Multikulturalisme

Pelebagaan tradisi multikulturalisme bertujuan untuk menciptakan struktur yang melindungi hak-hak kelompok minoritas sambil memastikan harmoni sosial dan kohesi nasional proses ini mencakup langkah-langkah seperti :

1. Pengakuan Hak Budaya. Negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kelompok etnis atau budaya untuk mempraktekkan tradisi mereka secara bebas.
2. Kebijakan Pendidikan Multikultural. Mengintegrasikan nilai-nilai dan pendidikan tentang keberagaman budaya dalam kurikulum nasional untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya toleransi dan saling menghormati.
3. Pengakuan politik. Menciptakan kebijakan inklusif yang memastikan kelompok-kelompok minoritas memiliki perwakilan politik dan akses terhadap pengambilan keputusan.
4. Kebijakan sosial. Menerapkan program-program sosial yang berfokus pada inklusi ekonomi, sosial, dan budaya bagi kelompok minoritas untuk memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya negara.
5. Legislasi khusus. Mengeluarkan undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan etnis atau agama dan menjamin hak-hak asasi manusia. (Will Kymlicka 1995).

Harmonisasi Sosial.

Pengertian harmoni sosial merujuk pada keadaan dimana individu dan kelompok dalam suatu masyarakat hidup berdampingan secara damai dengan saling menghormati, bekerja sama dan memahami perbedaan yang ada, baik itu perbedaan etnis, agama, budaya, maupun status sosial. Harmonisasi sosial terjadi ketika ada keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat, serta tidak adanya konflik yang signifikan di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Berikut ini ada beberapa elemen-elemen kunci dalam pemahaman harmoni sosial yang ditandai oleh indikator, a. adanya toleransi, b. adanya keadilan sosial, c. adanya kesetaraan dan inklusi, d. adanya dialog dan komunikasi, e. adanya kohesi sosial, f. adanya penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat, g. adanya resolusi konflik. (Bhikhu Parekh, 2000).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian.

Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo pada kelompok etnis lokal Gorontalo dengan kelompok etnis transmigrasi. Alasan penetapan lokasi penelitian disebabkan kabupaten Boalemo sebagai tujuan penempatan transmigrasi dari tahun 1980 mengalami perubahan sosial yang dapat berpotensi terjadinya gesekan sosial sebagai akibat dari penguasaan sumber daya ekonomi sehingga etnis lokal Gorontalo masih tetap dapat menerima kehadiran kelompok etnis transmigrasi, dengan adanya hubungan harmonis peneliti tertarik untuk menguji beberapa teori sosial dan juga menguji kemampuan pemerintah daerah kabupaten Boalemo dalam menata kehidupan antar etnis di kabupaten Boalemo.

Desain penelitian

Untuk membuktikan dan menguji beberapa teori sosial terhadap pemetaan konflik sosial diperlukan pendekatan penelitian kualitatif dalam mengungkap mengapa penempatan transmigrasi di wilayah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo masih tetap sangat tangguh dalam menjaga keharmonisan antar kelompok etnis transmigrasi dengan kelompok etnis lokal.

Sumber Data

Dalam menggali informasi fokus penelitian ini menggunakan sumber Informan yang mengetahui kondisi masyarakat dilokasi transmigrasi berdasarkan perwakilan dari beberapa etnis yang ada dilokasi penelitian. Begitu juga dengan informan kunci dari pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Seperti Bupati, Sekda, kepala Kesbangpol kabupaten Boalemo, camat, kepala desa, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat.

Pengumpulan data

Untuk pengumpulan data bagi penataan etnis dilokasi transmigrasi dilakukan melalui observasi terhadap kondisi transmigrasi di wilayah kabupaten Boalemo, wawancara dengan *key person* dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

Analisis Data.

Model analisis interaktif dibagi dalam 3 (tiga) tahapan berikut: *tahap pertama data reduction* (pengurangan data), merupakan proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan, menyeleksi dan penyederhaan data yang diperoleh dilapangan. *Tahap kedua*

Data Display (penyajian data) merupakan sekumpulan hasil reduksi data kemudian diorganisasikan kedalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Tahap ketiga *Conclusion Drawing/Verification* (penarikan kesimpulan) yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan ketahanan nasional dalam penataan hubungan harmonis antar etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Bila melihat penataan kebijakan etnis di kabupaten Boalemo yang dilaksanakan melalui kebijakan makro dalam membangun tradisi multikulturalisme. Hasil penataan tersebut dilaksanakan dalam wujud sosialisasi tradisi multikulturalisme melalui Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB). Berdasarkan penelusuran dilapangan diawali dari pernyataan bapak DR.Sheman Moridu,S.Pd,MM yang ditemui diruang kerjanya memberikan keterangan terhadap tradisi multikulturalisme sebagai berikut :

“Dalam merawat tradisi multikulturalisme pemerintah daerah Kabupaten Boalemo selalu kebijakannya berpihak kepada kepentingan bersama, tanpa membeda-bedakan dalam pelayanan publik dan itu dilakukan dalam semua jangkauan pemerintahan. Apalagi kabupaten Boalemo ini benar-benar sebagai daerah multikultural, karena terdiri dari Sembilan (9) etnis dan ras dimana masyarakat Kabupaten Boalemo sebagai daerah penempatan transmigrasi dan migrasi yang terdiri dari etnis Jawa, ras Arab, suku Makasar, suku Minahasa, Suku Bali, Lombok, ras China, etnis Sangir, etnis Gorontalo semua diperlakukan dengan adil didalam memberikan pelayanan publik (wawancara tanggal 8 Januari 2024)”.

Pernyataan Bupati Boalemo di atas masih dalam kebijakan pelayanan publik dan memposisikan sebagai pemerintah daerah yang tidak pilih kasih dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Dengan kebijakan tersebut sangat membantu merukunkan masyarakat kabupaten Boalemo yang multikultural. Kebijakan menjadi bapak dari kepala rumah tangga warga masyarakat Boalemo, sehingga harus bersikap adil dalam setiap memberikan bantuan sosial bagi rakyatnya, tanpa melihat dari etnis, agama, ras dan ideologi pilihan politik. Semua ini dilaksanakan dalam rangka merawat tradisi multikulturalisme, agar supaya masyarakat kabupaten Boalemo merasa nyaman menjadi penduduk kabupaten Boalemo.

Untuk lebih mendapatkan tindak lanjut dari informasi dari kondisi tradisi multikulturalisme di Kabupaten Boalemo, peneliti menemui dikemukakan oleh sekda Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo bapak Suprananda Nu,ST, ditemui diruang kerja menyampaikan kondisi kabupaten Boalemo sebagai berikut :

“Menyatakan kabupaten Boalemo sebagai penempatan transmigrasi sejak tahun 1980an yang penempatannya bukan hanya di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Paguyaman, akan tetapi penempatannya pun ada di wilayah Kecamatan Paguyaman Pantai. Penempatan transmigrasi di dua wilayah kecamatan yakni kecamatan Wonosari dan kecamatan Paguyaman sudah berlangsung sejak tahun 1980an dan untuk wilayah Kecamatan Paguyaman Pantai Program transmigrasi dibuka atau ditempatkan sejak tahun 2015. Melihat bentang alam sebelum adanya transmigrasi hanya hutan

belantara. Dengan masuknya transmigrasi telah merubah kawasan hutan menjadi areal pertanian yang sangat berkontribusi bagi ketahanan pangan di daerah kabupaten Boalemo. Namun kehidupan antar warga transmigrasi dan kelompok etnis lokal Gorontalo masih terjalin hubungan yang sangat harmonis dari sejak transmigrasi memasuki wilayah kabupaten Boalemo, hingga penempatan di tahun 2015 di Kecamatan Paguyaman Pantai kondisi hubungan antar kelompok etnis lokal Gorontalo dengan etnis transmigrasi, masih tetap terjalin hubungan harmonis, tanpa ada konflik yang menjurus kepada konflik komunal (wawancara tanggal 4 Januari 2024)".

Berdasarkan jawaban informan Sekda Boalemo tersebut menjadikan kabupaten Bolalemo tidak pernah memikirkan formulasi kebijakan berupa RANPERDA tentang tradisi multikulturalisme di Kabupaten Boalemo. Dan ini juga dikemukakan oleh salah seorang anggota DPRD Kabupaten Boalemo ketika ditemui di ruang kerjanya memberikan jawaban atas ketiadaan RANPERDA tentang tradisi multikulturalisme di Kabupaten Boalemo sbb :

“DPRD Kabupaten Boalemo tidak pernah membahas RANPERDA tradisi multikulturalisme dalam rangka memperkuat tradisi multikulturalisme melalui sosialisasi dari Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB) di Kabupaten Boalemo. Dan itu diperkuat oleh staf sekertariat DPRD Kabupaten Boalemo yang menyatakan tidak pernah menjadi pembahasan RANPERDA tentang tradisi multikulturalisme (wawancara tanggal 4 Januari 2024)".

Berdasarkan jawaban informan tersebut menunjukkan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Boalemo belum memikirkan RANPERDA tradisi multikulturalisme sebagaimana yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Namun keyakinan itu bisa menjadi permasalahan bila terjadi perkembangan situasi dalam jangka panjang antar warga transmigrasi dengan kelompok etnis lokal Gorontalo.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan ketahanan nasional dalam penataan Etnis di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Boalemo kebijakan ketahanan nasional berupa kebijakan mikro tidak diformulasikan dalam bentuk RANPERDA tradisi multikulturalisme sekalipun di daerah tempat tujuan transmigrasi memiliki potensi konflik dimasa depan. Namun pemerintah daerah Kabupaten Boalemo masih dapat merawat kebhinekaan melalui sosialisasi tradisi multikulturalisme melalui sosialisasi tradisi multikulturalisme lewat Forum Komunikasi antar umat beragama (FKUB). Untuk menemukan jawaban tersebut, ada beberapa indikasi faktor pendukung terciptanya hubungan yang harmonis di wilayah kabupaten Boalemo di bawah ini.

Kearifan lokal

Faktor-faktor pendukung dalam membangun hubungan harmonis antar etnis Bali, Minahasa dengan etnis lokal Gorontalo ,etnis Jawa, ras arab, ras Eropa dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Hal ini terlihat dari pernyataan warga transmigrasi informan penelitian Abdul Holid dan Abdulah juga mengatakan bahwa :

“Etnis Lokal Gorontalo sangat ramah kepada warga transmigrasi sampai dengan saat ini, dikatakan agak mudah menjalin hubungan harmonis dengan etnis Gorontalo karena sekeyakinan agama, sehingga terjalin hubungan harmonis hingga saat ini, apalagi tradisi enis lokal Gorontalo dengan kearifan lokalnya diacara-acara ritual keagamaan seperti diacara kematian, dan setelah kematian ada

adat hari ke 3, ke 7, ke 20, ke 40 dan ke 100 hari, disaat itu terjadi proses pembauran antar kelompok etnis lokal dengan kelompok etnis Jawa. Dan juga diacara hajatan untuk orang Gorontalo selalu mengundang tetangga terdekat. Dengan kearifan lokal Gorontalo, kami dari warga transmigrasi dari Jawa bisa merasa satu keluarga besar dengan etnis lokal Gorontalo (Wawancara 28 Januari 2024)”.

Dengan adanya kearifan lokal Gorontalo pada kegiatan ritual keagamaan dapat menyatukan hubungan harmonis antara etnis Jawa dengan etnis Gorontalo, apalagi dengan kegiatan ritual ketupat dari etnis Jawa menambah hubungan interaksi sosial dalam memperkuat integrasi nasional di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Institusi Pendidikan Formal melalui Pendidikan multikultural di sekolah.

Salah satu yang sangat berpengaruh didalam menjaga tradisi multikulturalisme di masyarakat Kabupaten Boalemo disumbang oleh institusi pendidikan formal. Dengan adanya pendidikan formal generasi muda dari semua etnis memasuki jenjang sekolah dasar dan digembleng melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama, pendidikan sejarah dan pendidikan bahasa Indonesia mendapatkan materi-materi bagaimana menyatukan warga negara yang berbeda agama, suku, ras dan ideologi politik untuk saling menghargai sehingga tercipta integrasi nasional.

Intervensi pendidikan formal yang dilakukan pemerintah daerah dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan, menjadi faktor penentu didalam melembagakan tradisi multikulturalisme di daerah kabupaten Boalemo, sehingga tradisi kearifan lokal yang dibawah para tokoh agama, tokoh masyarakat yang dianggap sepuh dapat dipelajari melalui pendidikan formal. (Amirin, 2013). Dengan kata lain, jika pendekatan pendidikan multikultural akan diimplementasikan di Indonesia, haruslah berdasarkan realita Indonesia dan kearifan lokal (*local wisdom atau indigenous knowledge*) dalam makna luas, tegasnya dengan memperhatikan karakteristik bangsa dan budaya Indonesia sendiri.

Pendidikan multikultural itu dapat dilihat atau diposisikan sebagai berikut :

1. Sebagai falsafah pendidikan; yaitu pandangan bahwa kekayaan keberagaman budaya Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar di Indonesia guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (berbarkat) dan bahagia dunia akhirat.
2. Sebagai pendekatan pendidikan; yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang kontekstual, yang memperhatikan keragaman budaya Indonesia. Meminjam “teori” Zamroni (2011a:149-gambar), kedudukan nilai budaya dalam struktur statis pendidikan (bawaan siswa, bawaan guru, kurikulum, dan pedagogi atau “*the art of teaching*”).
3. Bidang kajian dan bidang studi; yaitu disiplin ilmu yang dibantu oleh sosiologi dan antropologi pendidikan menelaah dan mengkaji aspek-aspek kebudayaan, terutama nilai-nilai budaya dan perwujudannya (norma, etiket atau tatakrama, adat-istiadat atau tradisi dan lain-lain mencakup “manifestasi budaya” agama) untuk/dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan.

Fakta literatur

Tradisi multikulturalisme dapat menjadi sebuah kebijakan administrasi publik harus terlebih dahulu mengetahui pengertian administrasi publik yang selalu diartikan sama dengan ilmu administrasi negara dengan demikian memiliki kesamaan juga dengan kajian kebijakan publik. Untuk memahami konsep tersebut sebaiknya dimulai dengan memahami kebijakan publik melalui pendekatan etimologi.

Berdasarkan segi etimologi Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada distruktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Pandangan Anderson tentang kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson, mengklasifikasi kebijakan, *policy*, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah¹.

Dalam mendukung teori administrasi publik menggali jawaban objek penelitian tentang tradisi multikulturalisme dalam membangun hubungan harmonis antar etnis melalui kebijakan ketahanan nasional dapat dilakukan melalui beberapa teori di bawah ini sebagai berikut :

Teori Birokrasi (Max Weber)

Teori birokrasi Max Weber menekankan pentingnya struktur formal, aturan, dan prosedur dalam organisasi. Dalam konteks kebijakan ketahanan nasional yang mencakup multikulturalisme, teori ini membantu menganalisis bagaimana struktur birokrasi pemerintah mendukung atau menghambat implementasi kebijakan yang bertujuan untuk harmonisasi antar etnis. ²Teori Birokrasi ini memberikan petunjuk bagi pemerintah daerah melaksanakan pelembagaan tradisi multikulturalisme dengan mempertimbangkan struktur formal, aturan dan prosedur dalam organisasi. Pelembagaan tradisi multikulturalisme sebagai kebijakan ketahanan nasional tidak semata-mata hanya mengikuti apa yang telah ada, tetapi bagaimana pemerintah

¹.Tahir,2020" *Kebijakan Publik &Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*".Halaman 20.

² . Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press.

daerah melakukan inovasi dalam membangun struktur serta regulasi berupa peraturan daerah tentang tradisi multikulturalisme dalam menjaga hubungan harmonis antar etnis di wilayah pemerintah daerah.

Teori Jaringan (Christopher Ansell dan Alison Gash).

Teori ini berfokus pada kolaborasi antara berbagai aktor dalam jaringan. Dalam konteks teori jaringan dapat digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah, kelompok etnis, dan organisasi masyarakat sipil bekerja sama dalam kebijakan ketahanan nasional untuk menciptakan harmoni antar etnis.³ pandangan teori ini memberikan isyarat bahwa mengimplementasikan kebijakan ketahanan nasional pada pelebagaan tradisi multikulturalisme mewujudkan keharmonisan antar etnis dapat dilakukan dengan kolaborasi antara berbagai aktor dalam jaringan. Ketentuan ini menjadi sebuah kewajiban pemerintah daerah membangun jaringan mulai dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa dengan membangun komunikasi juga dengan FORKOMPIMDA (pemerintah daerah, kejaksaan, TNI dan POLRI) mewujudkan terlaksananya pelebagaan tradisi multikulturalisme di daerah.

Teori Partisipasi (Robert Putnam)

Teori partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kebijakan ketahanan nasional, teori ini relevan untuk memahami bagaimana partisipasi kelompok etnis mempengaruhi kebijakan yang mendukung integrasi dan harmoni.⁴ Teori ini memberikan petunjuk kepada pemerintah daerah bila ingin melelebagaan tradisi multikulturalisme tidak melupakan keterlibatan warga masyarakat dalam memahami terlebih dahulu konsep tradisi multikulturalisme. Membangun kesadaran warga masyarakat menjadi prioritas utama dalam mengimplementasikan teori partisipasi tersebut.

Berdasarkan fakta literatur di atas menunjukkan bahwa melelebagaan tradisi multikulturalisme dalam wujud kebijakan ketahanan nasional diperlukan beberapa teori dalam membangun hubungan harmonis antar etnis di kabupaten Boalemo sebagai lokasi transmigrasi sejak tahun 1980 an, dan saat ini telah terjadi perubahan sosial, dimana warga transmigrasi dengan etos kerja yang tinggi dilokasi transmigrasi telah memperbaiki kualitas hidup warga transmigrasi, sehingga menjadi komponen terpenting bagi warga masyarakat kabupaten Boalemo yang memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten Boalemo. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah Kabupaten Boalemo harus melakukan kebijakan ketahanan nasional dalam menjaga stabilitas keamanan, politik, sosial budaya melalui pelebagaan tradisi multikulturalisme.

Dampak Kebijakan ketahanan nasional dalam penataan etnis melalui pelebagaan tradisi multikulturalisme terhadap ketahanan wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

³ . Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571.

⁴ . Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.

Bahwa berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis dan menemukan teorikal *gap* dan emperikal *gap* tentang tradisi multikulturalisme dalam membangun hubungan harmonis antar etnis melalui perspektif kebijakan ketahanan nasional (Studi di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo), maka terdapat beberapa implikasi dari *novelty* penelitian ini diantaranya

1. Pemerintah daerah akan lebih efektif dalam menjalankan tradisi Multikulturalisme untuk membangun hubungan harmonis antara kelompok etnis transmigrasi dengan kelompok etnis lokal Gorontalo, demi terwujudnya integrasi nasional di daerah Kabupaten Boalemo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Gorontalo untuk penempatan transmigrasi.
2. Efisien dalam membentuk melembagakan tradisi multikulturalisme dalam menjaga hubungan harmonis antar kelompok etnis yang berasal dari kelompok etnis transmigrasi dengan kelompok etnis lokal Gorontalo demi terwujudnya integrasi nasional.
3. Responsivitas dari kinerja aparaturnya dalam menjaga stabilitas daerah Kabupaten Boalemo akan semakin intensif setelah ada hasil temuan penelitian tentang potensi konflik bagi daerah kabupaten Boalemo sebagai lokasi penempatan transmigrasi di Provinsi Gorontalo.
4. Hasil temuan penelitian tentang indeks ketahanan wilayah yang menyatakan sangat tangguh terhadap kondisi stabilitas di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo akan mendorong pemerintah daerahnya untuk lebih berinovasi menjaga hubungan harmonis antar etnis dan mendorong untuk memformulasikan RANPERDA tentang tradisi multikulturalisme, demi memperkuat kondisi ketahanan nasional dalam jangka waktu yang panjang, agar dapat memberikan kenyamanan bagi warga transmigrasi yang telah sekian lama menempati daerah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
5. Implikasi dari tujuan penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi ancaman bagi kerukunan warga transmigrasi dengan kelompok etnis lokal Gorontalo untuk mendorong diformulasikan RANPERDA tentang tradisi multikulturalisme bagi keharmonisan sosial sepanjang masa di wilayah Kabupaten Boalemo sebagai lokasi penempatan transmigrasi di Provinsi Gorontalo.
6. Asset yang diperoleh warga transmigrasi akan memiliki kepastian hukum selama diperoleh dari sejak penempatan transmigrasi di wilayah Kabupaten Boalemo.
7. Perasaan nyaman bagi warga transmigrasi di lokasi penempatan transmigrasi karena pemerintah daerah berperan langsung dalam mengambil tanggung jawab memberikan kenyamanan bagi warga transmigrasi di wilayah Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Discussion

Bentuk-bentuk kebijakan ketahanan nasional dalam penataan etnis melalui pelebagaan tradisi multikulturalisme di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Bentuk Penataan keragaman etnis melalui implementasi kebijakan ketahanan nasional melalui sosialisasi tradisi multikulturalisme pemerintah daerah kabupaten Boalemo dianggap sangat tangguh karena formulasi

kebijakan ketahanan nasional dilaksanakan melalui sosialisasi Forum komunikasi antar umat beragama (FKUB) sangat intens dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Boalemo sampai kepada pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa. Bila dilihat dari beberapa bentuk penataan etnis yang dikemukakan Effendi dalam Esman (2010 : 180) menawarkan konsep upaya mengendalikan hubungan antar etnis menawarkan tiga metode berikut manajemen hubungan antar etnis sebagai berikut :*pertama. Preferensi sistimatis*. Metode ini mencakup pemberian preferensi kepada kelompok etnis sendiri dalam rekrutmen untuk posisi penting pada birokrasi pemerintahan baik sipil dan militer, dan dalam alokasi sumber dan pelayanan oleh instrumen AP. *Kedua, Mekanisme pasar dan Merit individual* mekanisme ini biasanya digunakan bila kelompok elite yang berkuasa yakin bahwa kelompok etnis mereka sudah berkemampuan tinggi dan karenanya dapat berkompetisi secara terbuka. Sistem ini bisa berhasil baik bila para elite yang memegang jabatan AP menerima dan punya komitmen tinggi terhadap nilai-nilai *universal fairness*. *ketiga, Power sharing* atau upaya sejenisnya untuk menciptakan keseimbangan partisipasi dan pemerataan antar etnis tercipta bila semua masyarakat etnis dijamin atau mendapatkan *share* secara adil, biasanya proporsional dengan jumlahnya, dalam lembaga perumusan kebijaksanaan negara, dalam birokrasi sipil dan militer, dalam akses terhadap pendidikan, dan dalam menikmati hasil dari kebijakan dan program pemerintah.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kebijakan ketahanan nasional dalam penataan Etnis melalui pelebagaan tradisi multikulturalisme di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Kebijakan ketahanan nasional dalam melembagakan tradisi multikulturalisme di wilayah Kabupaten Boalemo dinilai positif dan memiliki nilai indeks ketahanan nasional yang sangat tangguh karena didukung oleh nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing etnis masih terpelihara pada kelompok warga transmigrasi dengan kelompok warga etnis lokal Gorontalo. selanjutnya faktor pendukung terlaksananya kebijakan ketahanan nasional dalam melembagakan tradisi multikulturalisme adalah keterlibatan institusi pendidikan formal dalam membentuk watak generasi mudah memiliki sifat dan prinsip hidup multikultural melalui pendidikan mata pelajaran agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah, pendidikan bahasa Indonesia. Disamping itu pemerintah daerah dan pemerintah pusat bersinergi dalam melaksanakan kebijakan makro melalui wadah organisasi FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) program dari kementerian agama di semua wilayah Indonesia. Dan untuk wilayah kabupaten Boalemo program FKUB dilaksanakan secara bersama FORKOMPIMDA kabupaten Boalemo sampai ditingkat pemerintahan desa mensosialisasikan pelebagaan tradisi multikulturalisme.

Dengan adanya kebijakan di atas membuat hubungan harmonis antar kelompok etnis dari transmigrasi dan kelompok etnis lokal hingga saat ini tidak terjadi konflik horizontal maupun konflik vertikal, sekalipun potensi konflik itu ada di wilayah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Dampak Kebijakan ketahanan nasional dalam penataan etnis melalui pelebagaan tradisi multikulturalisme terhadap ketahanan wilayah di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.

Kebijakan ketahanan nasional terhadap pelembagaan tradisi multikulturalisme di wilayah kabupaten Boalemo sebagai lokasi penempatan transmigrasi memberikan dampak yang positif khususnya bagi kemajuan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi bagi pemerintah daerah kabupaten Boalemo. Mengapa demikian karena sikap multikulturalisme telah membuka ruang komunikasi antar etnis dalam membangun daerah Kabupaten Boalemo menjadi terbuka dalam segala hal. Sebagaimana kegiatan usaha pertanian dan usaha perdagangan warga transmigrasi dapat diterima warga masyarakat lokal Gorontalo. semua ini berkat kerja keras pemerintah daerah dalam melembagakan tradisi multikulturalisme melalui kebijakan makro dilaksanakan oleh Forum Komunikasi antar umat Beragama (FKUB) serta didukung oleh kearifan lokal serta institusi pendidikan formal membentuk warga masyarakat di kabupaten Boalemo menjadi warga masyarakat yang harmonis.

SIMPULAN

Temuan terpenting pada objek penelitian melalui (P) Kebijakan ketahanan nasional dalam melembagakan tradisi multikulturalisme dinilai efektif dalam menjaga integrasi nasional di wilayah kabupaten Boalemo sebagai lokasi penempatan transmigrasi di Provinsi Gorontalo yang dilakukan melalui kebijakan makro dilaksanakan secara rutin disebabkan (R) adanya kerjasama aparatur pemerintah daerah kabupaten Boalemo sampai ke tingkat pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa yang sangat terorganisir sesuai dengan formulasi kebijakan yang direncanakan. Demikian juga bentuk-bentuk kelembagaan penataan etnis (E) seperti peran lembaga pendidikan formal dan kearifan lokal dilaksanakan secara terencana. (C) Dengan kerja keras pemerintah daerah kabupaten Boalemo melaksanakan program kebijakan makro pemerintah pusat daerah kabupaten Boalemo dapat dijadikan sebagai *rool model* dalam menata hubungan antar etnis di negara Indonesia.

Kekuatan Tulisan (Kontribusi)(P)kebijakan ketahanan nasional yang menjadi pilihan penataan antar etnis melalui pelembagaan tradisi multikulturalisme melalui kebijakan makro membentuk Forum komunikasi antar umat beragama (FKUB) berhasil dalam meredam konflik antar etnis di wilayah kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.(R)karena berdasarkan hasil penelitian terungkap ada kekuatan baru model penataan etnis tradisi multikulturalisme dilokasi transmigrasi, dimana kelompok etnis lokal Gorontalo memiliki kesamaan dalam mewujudkan kearifan lokal, dan ditunjang oleh institusi pendidikan formal dalam menanamkan nilai-nilai tradisi multikulturalisme kepada setiap generasi (E) sementara nilai tradisi multikulturalisme telah tumbuh pada warga etnis lokal dengan warga transmigrasi dan masih terpelihara sehingga mempermudah warga masyarakat menyatu dengan kehidupan antar etnis lokal Gorontalo dengan etnis warga transmigrasi. (C) Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan kebijakan ketahanan nasional terhadap pelembagaan tradisi multikulturalisme melalui Forum komunikasi antar umat Beragama (FKUB), dan ditunjang oleh para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di wilayah kabupaten Boalemo dalam melembagakan tradisi

multikulturalisme sebagai nilai asli (kearifan lokal) yang ada pada warga masyarakat membuat hubungan antar etnis dilokasi transmigrasi tidak mengalami konflik sosial.

Keterbatasan tulisan (yang belum sempat dikerjakan) adalah (P) Pemerintah daerah belum memiliki rancangan peraturan daerah tentang tradisi multikulturalisme sebagai wujud pemerintah daerah bertanggung jawab penuh kepada stabilitas politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Artinya belum lengkap sebuah model penataan etnis bila pemerintah tidak memformulasikan kebijakan ketahanan nasional pada pelembagaan tradisi multikulturalisme dalam memberikan rasa nyaman kepada warga transmigrasi dalam jangka waktu yang panjang. (R). Dengan hadirnya Peraturan Daerah terhadap pelembagaan tradisi multikulturalisme akan melengkapi kebijakan mikro menambah bentuk kebijakan ketahanan nasional yang bersifat makro yang dilaksanakan oleh semua pemerintahan daerah di Indonesia. (E) Dengan ketiadaan peraturan daerah tentang tradisi multikulturalisme akan menjadi sebuah kelemahan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan integrasi nasional yang sifatnya permanen, mengapa demikian karena apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam melembagakan tradisi multikulturalisme masih memiliki kekurangan dan berharap kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo harus memiliki perda tentang tradisi multikulturalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Fedyani Syaifuddin. (2015). Membumikan Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*.
- Amirin, T. M. (2013). implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1047>
- Fadli, R. V., Malang, U. N., & Sanankulon, K. (2022). Nilai-Nilai Multikulturalisme Tradisi Kupatan di Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. 4(1), 12–20.
- Nugraha, D. (2020). URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 140. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40809>
- Ubadah. (2022). *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Konsep, Pendekatan, dan Penerapannya dalam Pembelajaran)*.
- Wahid, A., Sunardi, S., & Kurniawati, D. A. (2019). MEMBUMIKAN KONSTITUSI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENJAGA HAK KEBHINEKAAN. *Yurispruden*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i2.2787>
- Achmad Fedyani Syaifuddin. (2015). Membumikan Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*.
- Amirin, T. M. (2013). implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v1i1.1047>
- Fadli, R. V., Malang, U. N., & Sanankulon, K. (2022). Nilai-Nilai Multikulturalisme Tradisi Kupatan di Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. 4(1), 12–20.
- Nugraha, D. (2020). URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2), 140. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40809>

- Ubadah. (2022). *PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Konsep, Pendekatan, dan Penerapannya dalam Pembelajaran)*.
- Wahid, A., Sunardi, S., & Kurniawati, D. A. (2019). MEMBUMIKAN KONSTITUSI INDONESIA SEBAGAI UPAYA MENJAGA HAK KEBHINEKAAN. *Yurispruden*, 2(2), 180. <https://doi.org/10.33474/yur.v2i2.2787>
- Ahmed, M. (2019). The Good, the Bad, and the Ugly: Implications of Ethnic Diversity in the Workplace. *Aisthesis*.
- Akom, A. (2011). Eco-apartheid: Linking environmental health to educational outcomes. *Teachers College Record*. <https://doi.org/10.1177/016146811111300404>
- Arneaud, M. J., Alea, N., & Waters, T. E. A. (2022). Flourishing Privately but Languishing Publicly: Ethnic Identity's Contribution to Understanding Eudaimonic Wellbeing. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. <https://doi.org/10.3390/ijerph192114156>
- Batty, L., & Reilly, K. (2023). Understanding barriers to participation within undergraduate STEM laboratories: towards development of an inclusive curriculum. *Journal of Biological Education*. <https://doi.org/10.1080/00219266.2021.2012227>
- Bazzi, S., Gaduh, A., Rothenberg, A. D., & Wong, M. (2019). Unity in diversity? How intergroup contact can foster nation building. *American Economic Review*. <https://doi.org/10.1257/aer.20180174>
- Collier, P. (2001). Implications of ethnic diversity. *Economic Policy*. <https://doi.org/10.1111/1468-0327.00072>
- Cservenka, A., Yardley, M. M., & Ray, L. A. (2017). Review: Pharmacogenetics of alcoholism treatment: Implications of ethnic diversity. In *American Journal on Addictions*. <https://doi.org/10.1111/ajad.12463>
- Feitosa, J., Lacerenza, C. N., Joseph, D. L., & Salas, E. (2017). Ethnic identity: Factor structure and measurement invariance across ethnic groups. *Psychological Assessment*. <https://doi.org/10.1037/pas0000346>
- Ferguson, G. (2020). The Palgrave handbook of minority languages and communities. *Journal of Multilingual and Multicultural Development*. <https://doi.org/10.1080/01434632.2019.1632511>
- Fisher, S., Zapolski, T. B., Wheeler, L., Arora, P. G., & Barnes-Najor, J. (2020). Multigroup Ethnic Identity Measurement invariance across adolescence and diverse ethnic groups. *Journal of Adolescence*. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2020.07.006>
- Hearle, K. (2022). Salinas: A History of Race and Resilience in an Agricultural City. *Steinbeck Review*. <https://doi.org/10.5325/steinbeckreview.19.2.0230>
- Hoshour, C. A. (2020). Resettlement and the politicization of ethnicity in Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003915>
- Howlader, M. A., Guo, T., & Cairo, C. W. (2022). Inhibitors of Human Neuraminidase Enzymes Block Transmigration in vitro. *Frontiers in Molecular Biosciences*. <https://doi.org/10.3389/fmolb.2022.835757>
- Iglesias, P. M. S. (2013). Los sistemas mandálicos como herramienta intercultural para organizar la enfermería internacional. *Cultura de Los Cuidados. Revista de Enfermería y Humanidades*.
- Inder, K. J., Lewin, T. J., & Kelly, B. J. (2012). Factors impacting on the well-being of older residents in rural communities. In *Perspectives in Public Health*. <https://doi.org/10.1177/1757913912447018>
- Just, A. (2017). Race, Ethnicity, and Political Behavior. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.238>
- Karim, S., Naeem, M. A., & Ismail, R. B. (2023). Re-configuring ownership structure, board characteristics and firm value nexus in Malaysia: the role of board gender and ethnic diversity. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-01-2021-0004>
- Kim, H., Li, N., Broyles, A., Musoka, L., & Correa-Fernández, V. (2023). Validity of the 15-item five-facet mindfulness questionnaire among an ethnically diverse sample of university students. *Journal of American College Health*. <https://doi.org/10.1080/07448481.2021.1892700>
- Kolo, P. (2015). New Approaches to the Dynamics, Measurement and Economic Implications of Ethnic Diversity. In *New Approaches to the Dynamics, Measurement and Economic Implications of Ethnic Diversity*. <https://doi.org/10.3726/978-3-653-02395-4>
- Krasnyakov, N. I. (2022). Integration of Central Asian Territories in the System of National and Regional

- Administration of the Russian Empire (19th Century). *Vestnik Novosibirskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Seriya: Istorija, Filologiya*. <https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21-1-63-74>
- Murtisari, A., Irham, I., Mulyo, J. H., & Waluyati, L. R. (2022). The Effects of the Transmigration Programme on Poverty Reduction in Indonesia's Gorontalo Province: A Multidimensional Approach. *Economies*. <https://doi.org/10.3390/economies10110267>
- Pratiwi, A., Matous, P., & Martinus, K. (2022). Transmigration programs and migrant positions in rural community knowledge networks. *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.09.019>
- Riddle, R. B., Jennbacken, K., Hansson, K. M., & Harper, M. T. (2022). Endothelial inflammation and neutrophil transmigration are modulated by extracellular matrix composition in an inflammation-on-a-chip model. *Scientific Reports*. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-10849-x>
- Santoso, T. R., Rahayu, R., & Setiana, A. R. S. (2023). Political interest of religious ritual: The Sundanese Nyangku ritual in Indonesia. *IAS Journal of Localities*. <https://doi.org/10.62033/iasjol.v1i2.16>
- Shukla, S. (2020). COVID-19 and Globalization, An Analysis. *An International Multidisciplinary Double-Blind Peer-Reviewed Research Journal*.
- Sutrisno, H., Hardiman, G., Pandelaki, E. E., & Susi, T. (2020). Acculturation of structure and construction in the houses of balinese migrants (case study: Basarang Jaya Village, Central Kalimantan). *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.2.3772>
- Warganegara, A., & Waley, P. (2022). The political legacies of transmigration and the dynamics of ethnic politics: a case study from Lampung, Indonesia. *Asian Ethnicity*. <https://doi.org/10.1080/14631369.2021.1889356>
- Wongsawat, S. (2017). Predicting factors for quality of life of elderly in the rural area. *International Journal of Arts & Sciences*.